

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perekonomian, uang adalah alat transaksi yang sangat penting. Seperti halnya dengan darah pada manusia, ketika darah tidak mengalir dengan semestinya, tentu akan menimbulkan permasalahan. Begitu juga dengan uang, ketika perputaran uang tidak sesuai dengan semestinya, tentu akan menimbulkan masalah dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia terdapat berbagai macam uang beredar seperti uang giral, kartal, dan kuasi.<sup>2</sup> Peredaran uang bersifat fluktuasi (kenaikan atau penurunan).

Bank Indonesia merupakan otoritas moneter yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang. Aktivitas ekonomi selalu berkaitan dengan permintaan uang. Menurut Friedman, Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang mengatur sirkulasi jumlah uang beredar dalam sebuah negara dan ketidakstabilan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pengendalian akan uang beredar.<sup>3</sup>

Menurut golongan Keynes penambahan uang yang relatif besar dalam perekonomian dapat sebagai motor penggerak perekonomian. Hal ini berkebalikan dalam pandangan kaum moneteris cenderung percaya

---

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-tiga*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.59.

<sup>3</sup> Friedman Milton, *The Quantity Theory of Money, a Restatement*, dalam Milton Friedman (ed), *Teori Kuantitas Uang*, (Chichago: Chichago University Press, 2010). Hal.49.

peranan uang dalam perkembangan perekonomian, disamping menyadari kemungkinan kenaikan harga. Pada tahap tertentu seperti *full employment*, uang memiliki nilai yang stagnan karena tidak memacu perkembangan ekonomi.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berprinsip syariah dimana surat berharga tersebut mempunyai jangka waktu yang pendek dalam mata uang Rupiah. Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah tersebut bertujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah.

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *ju'ālah*, *wadī'ah*, *qard*, *wakālah*. Saat ini SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS dan UUS. BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.<sup>4</sup>

SBIS memiliki beberapa karakteristik yaitu SBIS merupakan satuan unit sebesar Rp 1 juta yang berjangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, yang diterbitkan tanpa warkat dan dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 217.

pada saat jatuh waktu SBIS. Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui BI-SSSS (Bank Indonesia- *Scriptless Securities Settlement System*) yaitu sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antar peserta, penyelenggara dan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.<sup>5</sup>

BUS atau UUS dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia. Repo adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *qard* yang diikuti dengan *rahn*. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS harus menandatangani Perjanjian Penggunaan SBIS dalam rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas repo SBIS.<sup>6</sup>

BUS atau UUS yang melakukan pembelian SBIS wajib memiliki saldo rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBIS. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga dan Saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Repo SBIS. Adapun imbal hasil yang diperoleh pada SBIS ini berasal dari dana laba pengendalian moneter dan APBN, hal ini terjadi karena dana sertifikat Bank Indonesia Syariah dimasukkan ke dalam rekening *wadī'ah amānah*

---

<sup>5</sup> Ibid., Hal.218.

<sup>6</sup> Ibid., Hal.220.

khusus tidak digunakan Bank Indonesia pada sektor riil. Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBIS sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan SBIS diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bagi masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBIS. Pembelian SBIS tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung ke Bank Indonesia melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang atau pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Kestabilan nilai Rupiah ini juga tercermin pada dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang lain. Aspek pertama akan terlihat pada laju inflasi sedangkan aspek kedua akan terlihat pada perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Selain aspek tersebut aspek lain yang menjadi pengaruh dalam penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah Produk Domestik Bruto.

Untuk mengetahui perkembangan dari masing-masing instrumen yang dapat mempengaruhi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah berikut ini disajikan tabel tentang perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto berikut ini dari tahun 2008-2020.

---

<sup>7</sup> Marliyah, "Pengaruh Inflasi dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah", dalam Taqaddum Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam, Vol. II, hal. 58.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Produk Domestik Bruto  
2008-2020.**

<b>Tahun</b>	<b>SBIS (dalam miliar persen)</b>	<b>Inflasi (dalam Persen)</b>	<b>Nilai Tukar Rupiah (Kurs USD terhadap IDR dalam persen)</b>	<b>Produk Domestik Bruto (dalam persen)</b>
2008	2,09%	11,06%	16,5%	12,46%
2009	7,59%	2,78%	-4,55%	15,87%
2010	7,09%	6,96%	0,85%	14,33%
2011	-4,59%	3,79%	6,64%	8,85%
2012	3,42%	4,30%	26,05%	13,17%
2013	-2,95%	8,38%	2,06%	346,37%
2014	2,83%	8,36%	10,9%	9,06%
2015	2,19%	3,35%	-2,62%	7,60%
2016	-7,2%	3,02%	0,84%	9,59%
2017	-1,75%	3,61%	7,42%	9,19%
2018	2,57%	3,13%	-4,01%	6,71%
2019	-2,33%	2,72%	1,89%	17,5%

Sumber:

- a. Variabel Y(SBIS): Otoritas Jasa Keuangan (Data Diolah), 2021
- b. Variabel X(Inflasi,Nilai Tukar Rupiah,Produk Domestik Bruto): Badan Pusat Statistik (Data Diolah). 2021

Berdasarkan pemaparan data diatas, menunjukkan bahwa SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter yang didasarkan pada prinsip syairah melalui operasi pasar terbuka. Hal ini terlihat pada setiap tahunnya pelelangan SBIS cenderung naik dan turun atau terjadi fluktuasi. Terjadinya fluktuasi disebabkan oleh pengaruh dari instrumen pada variabel X (Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Produk Domestik Bruto). Pada tahun 2008 jumlah SBIS yang berhasil dilelang yaitu berjumlah Rp. 2,09%

dan mengalami peningkatan sebesar setengah miliar dan menjadi 7,59% pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 5% menjadi 7,09%. Setelah itu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011, mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu mencapai -4,59%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 pun masih mengalami penurunan yaitu sebesar 3,42%. Setelah itu masih mengalami penurunan lagi pada tahun 2013 yaitu sebesar -2,95%. Lalu pada tahun 2014, mengalami penurunan lagi sebesar 2,83% dan langsung mengalami peningkatan sebesar 2,19% pada tahun 2015. Setelah itu pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar -7,2%. Lalu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017 yaitu sebesar -1,75%. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2,57%. Dan setelah itu mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 sebesar -2,33%.

Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dan penurunan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti merumuskan judul **“Analisis Korelasi antara Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Produk Domestik Bruto pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah Periode 2008-2020”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat penulis dapat mengajukan identifikasi masalah dibawah ini sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (variabel Y) mengalami fluktuasi yang terus menerus terjadi pada kurun waktu 12 tahun yaitu mulai tahun 2008-2020.
2. Inflasi (variabel X) juga mengalami fluktuasi yang terus menerus terjadi pada kurun waktu 12 tahun yaitu mulai tahun 2008-2020.
3. Nilai Tukar Rupiah (variabel X) juga mengalami fluktuasi yang terus menerus terjadi pada kurun waktu 12 tahun yaitu mulai tahun 2008-2020.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Adakah korelasi yang signifikan antara Inflasi pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020?
2. Adakah korelasi yang signifikan antara Nilai Tukar Rupiah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020?
3. Adakah korelasi yang signifikan antara Produk Domestik Bruto pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020?

### **D. Tujuan**

1. Untuk menguji adakah korelasi antara Inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020.
2. Untuk menguji adakah korelasi antara Nilai Tukar Rupiah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020.
3. Untuk menguji adakah korelasi antara Produk Domestik Bruto dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada periode 2008-2020.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai pedoman untuk mengetahui tentang tingkat perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang sesuai berdasarkan variabel ekonomi lainnya seperti Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Produk Domestik Bruto.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan untuk Bank Indonesia: Penelitian ini diharapkan menjadi dokumentasi atas apa yang telah diteliti terkait korelasi antara inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto pada sertifikat bank indonesia syariah periode 2008-2020.

Kegunaan untuk jurusan Perbankan Syariah: Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan terkait analisis korelasi antara inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto pada sertifikat bank indonesia syariah periode 2008-2020.

Kegunaan untuk peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian setelah ini yang berkaitan dengan analisis korelasi antara Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Produk Domestik Bruto pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah variabel yang akan di uji. Batasan penelitian adalah pembatasan terhadap konteks penelitian agar tidak keluar koridor penelitian dengan Batasan sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari laporan tahunan variabel ekonomi yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada periode 2008 sampai 2020.

Ruang lingkup penelitian adalah untuk menganalisis kemungkinan Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami kondisi fluktuasi dengan variabel Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, menghubungkan tiap variabel, mengolah data hingga diperoleh permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai variabel dependen (terikat) dan variabel Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Produk Domestik Bruto sebagai variabel independen (bebas).

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No:10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Secara umum, penempatan dana pada SBIS akan mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 7 ayat (1) SBI Syariah diterbitkan melalui

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2009) Hal.217.

mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun, BUS atau UUS dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR). BUS dan UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS (FDR > 80% dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS).

Menurut teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang memiliki jangka waktu yang pendek. SBIS ini merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menentukan berapa tingkat margin pada Bank Syariah.

## 2. Inflasi

Menurut Boediono, inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan berlangsung terus-menerus.<sup>9</sup> Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang belum dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas dan memicu kenaikan harga-harga barang lainnya. Demikian pula dengan dengan kenaikan harga barang yang bersifat sementara atau yang terjadi hanya sekali saja juga dapat belum dikategorikan inflasi.<sup>10</sup>

Menurut teori diatas inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan harga-harga yang meningkat secara umum dan terus berlangsung yang

---

<sup>9</sup> Boediono, *Permintaan Uang di Indonesia*, Bulletin of Indonesian Economic Studies (1985), Vol. XXI. No. 2, August 1985. Hal.50.

<sup>10</sup> M. Saleh dan Sony Sumarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*. (Jember: Unej Press, 2015) Hal.130.

mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan nilai mata uang dalam suatu negara.

### 3. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.<sup>11</sup>

Perdagangan internasional akan mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Transaksi ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang nilai tukar. Menurut Sadono Sukirno nilai tukar adalah: “Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya”.

Menurut teori-teori yang dikemukakan diatas nilai tukar rupiah adalah nilai dari pertukaran mata uang antara mata uang dalam negeri dan mata uang asing yang diakibatkan oleh aktivitas perdagangan luar negeri atau biasa disebut ekspor impor.

---

<sup>11</sup> Richard G. Lipsey dkk, *Pengantar Makro Ekonomi*,(Jakarta: Erlangga, 1992),Ed ke-8, Hal 379.

#### 4. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan penjumlahan dari nilai tambah produk akhir barang dan jasa keseluruhan sektor yang dihasilkan di wilayah domestik perekonomian suatu perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu biasanya tahunan atau triwulanan.<sup>12</sup>

Dalam definisi di atas terkandung istilah nilai tambah dan produk akhir barang dan jasa yang akan diuraikan lebih lanjut. Jadi, Produk Domestik Bruto adalah hasil penjumlahan semua Produk yang telah dihasilkan oleh suatu negara tetapi dalam jumlah kotor atau jumlah keseluruhan produk tersebut.

---

<sup>12</sup>Maddaremmeng A. Panennungi dan Novia Xu, *Perekonomian Indonesia dalam Tujuh Neraca Makroekonomi*, Seri 1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hal.8.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Identifikasi Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan
- e. Kegunaan Penelitian
- f. Penegasan Istilah
- g. Ruang Lingkup
- h. Keterbatasan Penelitian

### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Dalam bab definisi operasional ini berisi tentang:

- a. Landasan Teori: SBIS, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Produk Domestik Bruto
- b. Penelitian Terdahulu
- c. Kerangka Konseptual
- d. Hipotesis Penelitian

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisi tentang:

- a. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
- b. Populasi, Sampling Dan Sampel Penelitian
- c. Sumber Data, Variabel Dan Skala Pengukurannya

- d. Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB 4 HASIL PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisi tentang:

- a. Hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis)
- b. Temuan penelitian

#### **BAB 5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **BAB 6 PENUTUP**

Dalam metode penelitian ini berisi tentang:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**